

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikuntoro, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rianeka Cipta, 2002).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Harahap, Yahya, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Reksodiputro, Mardjono , Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).

Ruslan, Rosadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Said, Buchari, Sari Pati Hukum Acara Pidana, (Unpas : FH, 2007).

Saleh, Roeslan, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, (Jakarta : Ghalia, 1983).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007).

Suharto dan Efendi Jonaedi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Sumaryo, Sidik, Kapita Selekta Peradilan Pidana, (Malang : Universitas Muhammadiyah, 2004).

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

Wahid, Fathul, Kamus Istilah Teknologi Informasi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang (UU No. 5 Tahun 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007)

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Perjanjian Kerja Sama MA, Kejaksaan, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference

JURNAL

Norika Fajriana, Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan, *Badamai Law Jurnal*, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 61

Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta , Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016, hlm. 2

WEBSITE

Joseph Fajar, Kompasiana, Crime Control Model dan Due Process Model Kesatuan Sistem Peradilan di Indonesia,
<https://www.kompasiana.com/josephsimatupangsianturi/5f0c848bd541df66cd072>

[e22/crime-control-model-dan-due-procces-model-kesatuan-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia](#)

LAMPIRAN



